

ANALISIS STRUKTUR EKONOMI EMPAT KABUPATEN WILAYAH BARLINGMASCAKEB

Oleh:

Ratna Setyawati Gunawan¹⁾ dan Diah Setyorini Gunawan²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This research was aimed to observe exist or not the difference of economics structure the regencies of BARLINGMASCAKEB members. This research use secondary data with observation period 1995-2002. Data used in this research include gross regional domestic product (PDRB) with oil and gas based on the constant price in 1993. The analysis instrument used in this research is Krugman's regional divergence index analysis. Based on the Krugman's regional divergence index analysis can be known that there is a huge difference on the economic structure between the Cilacap Regency with the regencies of another BARLINGMASCAKEB members. The Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas and Kebumen Regency has relative equal economic structure.

Keywords: *Economic structure, Krugman's regional divergence index*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah menurut Sibero (1985:4) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha pemerataan dan menyebarluaskan pembangunan di daerah dengan tujuan untuk menyetarakan dan menyeimbangkan atau memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta memadukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru, merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dengan daerah yang lain. Kondisi daerah meliputi masalah yang dihadapi oleh daerah, kebutuhan daerah, dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan pembangunan akan berhasil apabila kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2003:195). Meier (1989:6) juga menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita riil. Dengan kata lain pembangunan ekonomi tidak lagi memuja pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran

pembangunan tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan (Kuncoro, 2004:63). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah serta antar sektor. Kesenjangan antar daerah menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber daya-sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun infrastruktur.

BARLINGMASCAKEB merupakan lembaga regional bagi upaya meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memanfaatkan potensi daerah. BARLINGMASCAKEB beranggotakan lima kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Lembaga regional ini secara resmi dibentuk pada tanggal 28 Juni 2003 atas inisiatif Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, dan Bupati Kebumen (barlingmascakeb.com, 2003). Rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB pada periode tahun 1995-2002 disajikan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.

**Tabel 5.1. Rata-rata PDRB per Kapita
Kabupaten-kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB
Periode 1995-2002 (dalam Rupiah)**

Kabupaten	Rata-rata PDRB per Kapita
Banjarnegara	1.005.630
Purbalingga	767.090
Banyumas	702.290
Cilacap	3.812.380
Kebumen	776.680

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai edisi

**Tabel 5.2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten-kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB
Periode 1995-2002 (dalam Persen)**

Kabupaten	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Banjarnegara	1,71
Purbalingga	2,81
Banyumas	2,34
Cilacap	5,24
Kebumen	1,25

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai edisi

Keterkaitan antar kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB dapat dilihat, antara lain dari terdapat tidaknya perbedaan struktur ekonomi kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB. Dalam kondisi nyata masing-masing daerah memiliki potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun infrastruktur yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan setiap daerah memiliki keunggulan pada sektor yang berbeda. Oleh karena itu permasalahan yang timbul adalah apakah terdapat perbedaan struktur ekonomi pada kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB?

METODE ANALISIS

Untuk mengamati dan melakukan analisis antar kabupaten dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB, digunakan indeks divergensi regional Krugman untuk menghitung perbedaan struktur ekonomi, dan karenanya spesialisasi regional. Krugman (dalam Kuncoro, 2002: 189-190) mendefinisikan indeks tersebut sebagai berikut.

$$SI_{jk} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

Keterangan:

- E_{ij} = PDRB dalam sektor i untuk wilayah kabupaten j
- E_j = Total PDRB untuk wilayah kabupaten j
- E_{ik} = PDRB dalam sektor i untuk wilayah kabupaten k
- E_k = Total PDRB untuk wilayah kabupaten k
- $i = 1, \dots, n$.

HASIL ANALISIS

1. Pertumbuhan Ekonomi Masing-masing Kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB ditunjukkan oleh tabel 3. Dari tabel 5.3. diketahui bahwa selama periode 1995-2002 masing-masing kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1995-1996, kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan relatif tinggi. Pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen mulai menurun, bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap adalah -3,31 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1998, kecuali Kabupaten Cilacap, kabupaten - kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Pada tahun 1998, Kabupaten Cilacap justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan relatif tinggi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang mengandalkan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penggerak perekonomiannya. Pada saat terjadi krisis ekonomi, kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap justru meningkat.

Mulai tahun 1999, kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB dikarenakan masih rentannya kegiatan sektoral terhadap adanya gejolak-gejolak ekonomi.

2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Masing-masing Kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB

Perkembangan rata-rata PDRB per kapita bagi masing-masing anggota lembaga regional BARLINGMASCAKEB ditunjukkan oleh tabel 5.4

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB yang memiliki PDRB per kapita rata-rata tertinggi selama

periode 1995-2002 adalah Kabupaten Cilacap. PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Cilacap selama periode 1995-2002 adalah sebesar Rp 3.911.408,00. PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Cilacap jauh melampaui PDRB per kapita kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Bahkan PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Cilacap jauh melebihi PDRB per kapita rata-rata Propinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar Rp 1.356.433,00. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki PDRB per kapita rata-rata paling rendah di antara kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, yaitu sebesar Rp 704.730,00. Besarnya angka PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya pembentukan PDRB dan perkembangan jumlah penduduk

Tabel 5.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB Periode 1995-2002 (dalam Persen)

Tahun	Kabupaten					Propinsi Jawa Tengah
	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap	Kebumen	
1995	7,15	6,11	8,21	2,43	6,19	7,34
1996	6,82	7,07	5,85	6	6,08	7,30
1997	0,75	7,56	2,4	-3,31	2,75	3,30
1998	-4,24	-8,27	-6,8	11,67	-13,03	-12,37
1999	0,44	1,1	0,53	3,72	-0,69	4,24
2000	1,14	2,78	4,03	6,92	4,67	3,93
2001	0,14	2,98	1,13	4,98	1,78	3,33
2002	1,49	3,14	3,39	9,49	2,27	3,48
Rata-rata	1,71	2,81	2,34	5,24	1,25	2,54

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai edisi

Tabel 5.4. Rata-rata PDRB per Kapita Kabupaten-kabupaten Anggota Lembaga Regional BARLINGMASCAKEB Periode 1995-2003 (dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten	PDRB per Kapita								Rata-rata
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
Banjarnegara	997,96	1.057,03	1.046,25	989,20	990,38	992,82	982,75	988,62	1.006,95
Purbalingga	734,48	777,46	784,78	721,85	721,82	781,47	798,64	816,24	769,6
Banyumas	691,31	714,08	752,26	677,05	675,41	695,81	697,25	715,18	704,73
Cilacap	3.325,48	3.404,26	3.232,03	3.762,83	3.862,45	4.073,85	4.241,84	4.596,31	3.911,41
Kebumen	761,04	808,13	823,75	712,75	729,94	800,86	781,48	795,46	781,18
Propinsi Jawa Tengah	1.321,64	1.409,56	1.442,11	1.243,80	1.280,66	1.330,32	1.361,88	1.381,30	1.356,43

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai edisi

3. Indeks Divergensi Regional Krugman

Tabel 5.5. Perhitungan Indeks Divergensi Regional Krugman Tahun 1995

	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap	Kebumen
Banjarnegara		0,263	0,337	1,029	0,274
Purbalingga			0,281	1,158	0,311
Banyumas				1,020	0,346
Cilacap					1,150
Kebumen					

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi
Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

Tabel 5.6. Perhitungan Indeks Divergensi Regional Krugman Tahun 2002

	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap	Kebumen
Banjarnegara		0,237	0,302	1,101	0,234
Purbalingga			0,336	1,076	0,298
Banyumas				0,987	0,395
Cilacap					1,159
Kebumen					

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi
Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman disajikan pada tabel 5.5 dan tabel 5.6. Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar pada struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dengan kabupaten - kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen yang mendekati satu dan lebih besar dari satu. Hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen memiliki struktur ekonomi yang kurang lebih sama. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks divergensi regional Krugman yang mendekati nol.

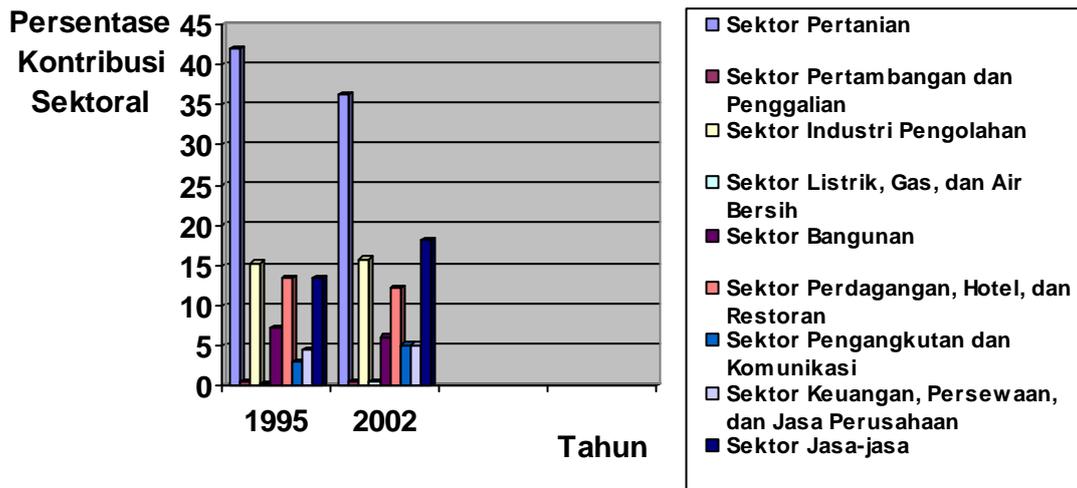
Dari perbandingan hasil perhitungan indeks divergensi regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002, dapat diketahui bahwa perbedaan struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga serta perbedaan struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas cenderung berkurang. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya nilai indeks divergensi regional Krugman pada tahun 2002 antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga serta antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Pada tahun 1995, nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga sebesar 1,158 dan nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas sebesar 1,02. Nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga dan nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas mengalami penurunan pada tahun 2002. Pada tahun 2002, nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga sebesar 1,076 dan nilai indeks divergensi regional Krugman antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas sebesar 0,987.

Grafik-grafik persentase kontribusi setiap sektor ekonomi di kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB pada tahun 1995 dan 2002 dapat menunjukkan terdapat tidaknya perubahan struktural di masing-masing kabupaten tersebut.

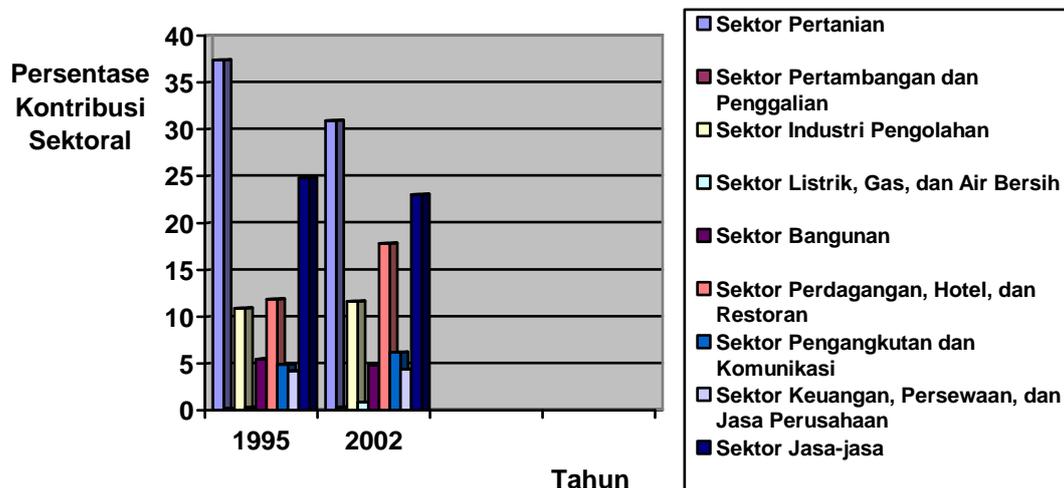
Dari gambar 5.1 dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara. Meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara tetap yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 1995 sebesar 41,93 persen sedangkan pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 36,27 persen.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara, yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan pada periode 1995-2002. Pada tahun 1995, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 15,33 persen dan 13,53 persen sedangkan pada tahun 2002 masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 15,80 persen dan 18,10 persen. Seperti halnya kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami penurunan.

Pada tahun 1995, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,53 persen sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,26 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara. Beberapa dari sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor pertambangan dan penggalan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.



Gambar 5.1. Persentase Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara



Gambar 5.2. Persentase Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara masih kecil (di bawah 10 persen). Fenomena penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara dan peningkatan kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjarnegara mengindikasikan mulai terjadi perubahan struktural di Kabupaten Banjarnegara.

Dari gambar 5.2 dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga tetap yang terbesar.

Kontribusi sektor pertanian pada tahun 1995 sebesar 37,35 persen sedangkan pada tahun 2002

kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 30,89 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga, yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami peningkatan pada periode 1995-2002.

Pada tahun 1995, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 10,91 persen dan 11,87 persen sedangkan pada tahun 2002 masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,66 persen dan 17,81 persen. Seperti halnya kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor jasa-jasa juga mengalami penurunan. Pada tahun 1995, kontribusi sektor jasa-jasa

sebesar 24,79 persen sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi sebesar 23,04 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Beberapa dari sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga masih kecil (di bawah 10 persen). Fenomena penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga dan peningkatan kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga mengindikasikan mulai terjadi perubahan struktural di Kabupaten Purbalingga.

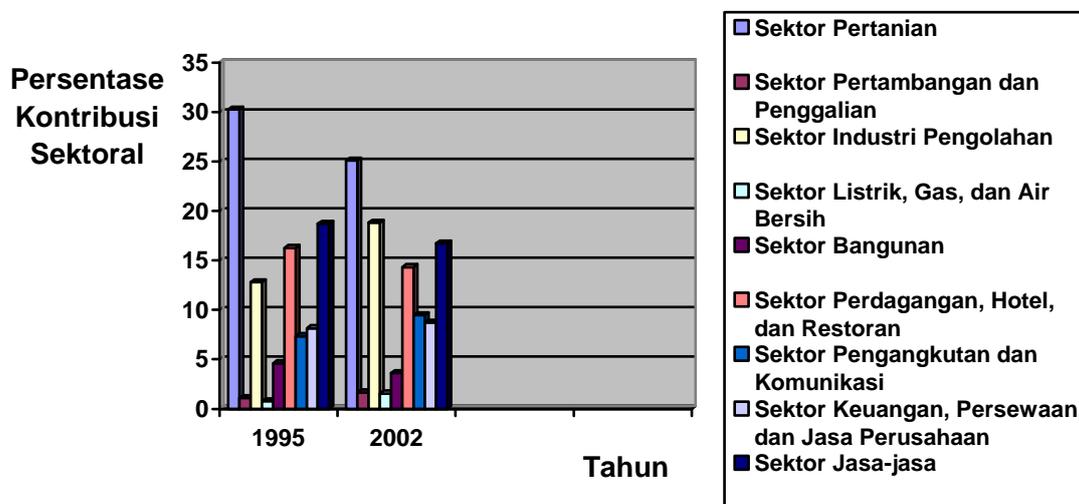
Dari gambar 5.3 dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas. Meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas tetap yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 1995 sebesar 30,25 persen sedangkan pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 25,09 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan pada periode 1995-2002.

Pada tahun 1995, kontribusi sektor industri pengolahan 12,81 persen sedangkan pada tahun 2002 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,83 persen. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan

restoran serta sektor jasa-jasa mengalami penurunan. Pada tahun 1995, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 16,26 persen dan 18,71 persen sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 14,34 persen dan 16,71 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.

Beberapa dari sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas masih kecil (di bawah 10 persen). Fenomena penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas dan peningkatan kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas mengindikasikan mulai terjadi perubahan struktural di Kabupaten Banyumas.

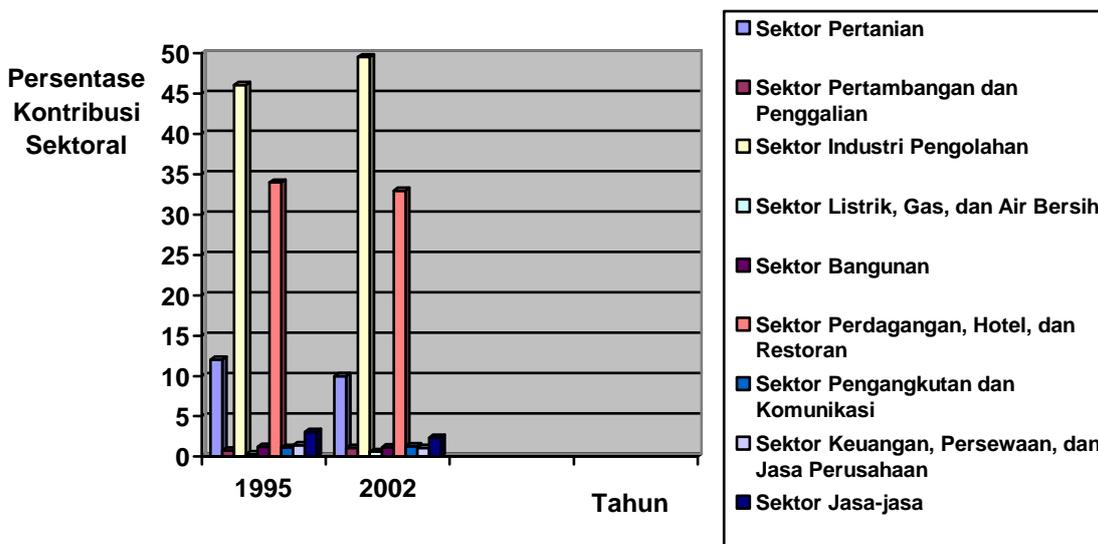
Dari gambar 5.4 dapat diketahui bahwa sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami penurunan jika dilihat dari kontribusi pada tahun 1995 dan kontribusi pada tahun 2002. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 1995 sebesar 46,09 persen dan pada tahun 2002 kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan menjadi sebesar 49,55 persen.



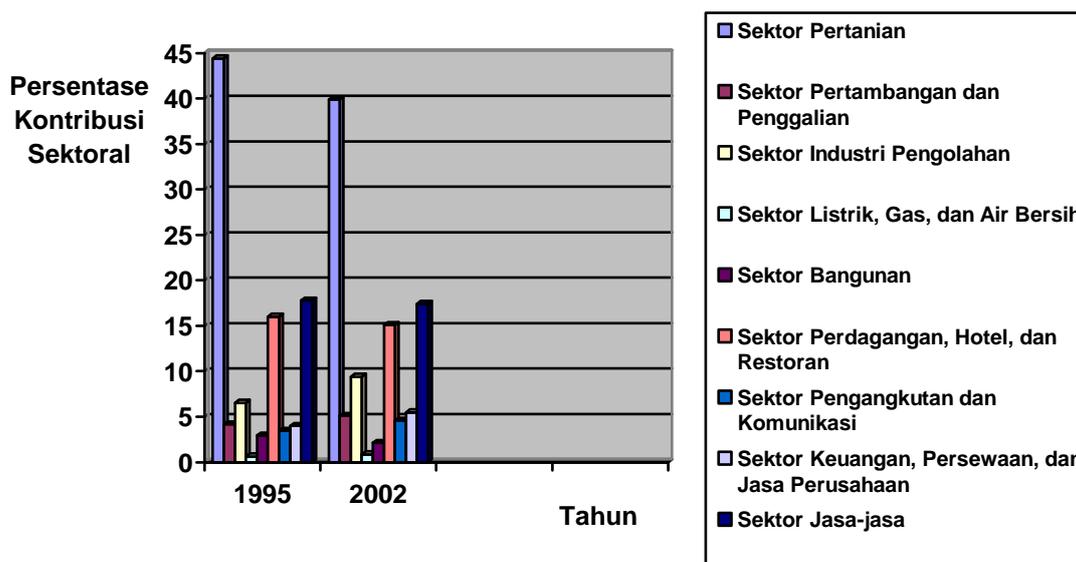
Gambar 5.3. Persentase Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas

Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 1995 sebesar 34 persen dan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi sebesar 32,97 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap. Beberapa dari sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap masih kecil (di bawah 10 persen). Sektor pertanian, sektor bangunan, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami penurunan kontribusi. Fenomena semakin meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap mengindikasikan belum terjadi perubahan struktural di Kabupaten Cilacap.



Gambar 5.4. Persentase Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Cilacap



Gambar 5.5. Persentase Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Kebumen

Dari gambar 5.5 dapat diketahui bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen. Meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen tetap yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 1995 sebesar 44,43 persen sedangkan pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi sebesar 39,90 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 1995, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 16,02 persen dan 17,78 persen sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 15,12 persen dan 17,41 persen. Sektor-sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen. Beberapa dari sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen masih kecil (di bawah 10 persen). Fenomena penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen dan peningkatan kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen mengindikasikan mulai terjadi perubahan struktural di Kabupaten Kebumen.

KESIMPULAN

Pada periode 1995 dan 2002, terdapat perbedaan yang besar pada struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen memiliki struktur ekonomi yang kurang lebih sama. Kontribusi sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Cilacap jauh lebih tinggi daripada kontribusi sektor-sektor tersebut di kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis di atas dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB harus diupayakan melalui strategi pembangunan yang tepat dengan memperhatikan potensi masing-masing kabupaten. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang merupakan potensi dari kabupaten tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian.
2. Adanya perbedaan struktur ekonomi yang besar antara Kabupaten Cilacap dengan kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya menunjukkan adanya spesialisasi di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, spesialisasi tersebut hendaknya dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Cilacap sebagai suatu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Jawa Tengah dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Semarang
- _____. 2003. *Selayang Pandang BARLINGMASCAKEB*. <http://www.barlingmascakeb.com> diakses 21 Desember 2004
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Industri*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta
- Meier, G.M. 1989. *Leading Issues in Economic Development, Fifth Edition*. Oxford University Press. New York
- Sibero, A. 1985. Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. *Prisma*. No. 12. Desember 1985.
- Todaro, M.P. 2003. *Economic Development, Eight Edition*. Addition Wesley Longman Inc. New York